

Studi Penerapan E-Katalog Dalam Meningkatkan Kinerja Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Magelang

Ignatius Haryadi ¹⁾, Yuli Setyowati ²⁾

^{1), 2)} Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

Author's Correspondence : ¹⁾ suratuntukigen@gmail.com, ²⁾ yulis2022@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the role of e-katalog in improving budget absorption performance. This research is descriptive qualitative research and the informants in this research include Budget Users, Government Goods/Services Procurement Officials and Working Groups. The data collection methods used include interviews, observation and documentation, while the analysis method used in this research is qualitative analysis. The results of the research can be stated that e-katalog can empirically improve the performance of budget absorption at the Magelang District Health Service. The application of e-katalog makes it easier for budget preparers to submit proposals with the prices of goods/services stated in the e-katalog so that budget planning is more realistic so that the budget absorption rate can reach an average of 94.01%. The budget absorption of the Health Service and Disaster Management Agency is still in the range of 80%, due to empirical conditions related to public health services and assistance to communities affected by disasters.

Keywords: Effectiveness, Transparency, Procurement Of Goods And Services

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran e-katalog dalam meningkatkan kinerja penyerapan anggaran. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan informan dalam penelitian ini meliputi Pengguna Anggaran, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kelompok Kerja. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa e-katalog secara empiris dapat meningkatkan kinerja penyerapan anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang. Penerapan e-katalog memudahkan penyusunan anggaran untuk menyampaikan usulan dengan harga barang/jasa yang tercantum dalam e-katalog sehingga perencanaan anggaran lebih realistis sehingga tingkat penyerapan anggaran dapat mencapai rata-rata 94,01%. Penyerapan anggaran Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana masih berada pada kisaran 80%, dikarenakan kondisi empiris terkait pelayanan kesehatan masyarakat dan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.

Kata Kunci: Efektivitas, Transparansi, Pengadaan Barang dan Jasa

Article History:

Received; 16-07-2024; Revised; 20-07-2024; Accepted; 26-07-2024



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Anggaran berimbang merupakan metode yang digunakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pemerintahan. Konsep berimbang ini mempunyai makna bahwa pendapatan sama dengan pengeluaran dan apabila pengeluaran lebih besar dari pendapatan, maka kondisi ini akan membebani generasi mendatang. Kondisi ini mempunyai makna bahwa apabila terjadi defisit, maka harus ditutup dengan hutang. Oleh karena itu, penting bagi setiap daerah untuk menyusun biaya penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dapat direalisasikan.

Penyusunan biaya pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan merupakan aspek penting dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah. Hal ini dimaksudkan agar penyerapan anggaran dapat optimal sehingga tidak menimbulkan kesan adanya pemborosan keuangan negara ataupun penyerapan anggaran yang rendah. Secara eksplisit, anggaran yang mengandung unsur pemborosan keuangan negara akan mengakibatkan defisit, sehingga berdampak pada timbulnya hutang pemerintah. Penyerapan anggaran yang rendah, secara implisit mencerminkan tidak profesionalnya penyusunan anggaran, walaupun ada faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhinya. Faktor internal yang menyebabkan rendahnya realisasi penyerapan anggaran seperti program kerja yang mengambang atau program kerja yang sifatnya ragu-ragu maupun sistem penyusunan anggaran yang hanya sekedar mengajukan anggaran. Faktor eksternal yang berdampak pada penyerapan anggaran yang rendah seperti tertundanya beberapa program kerja yang disebabkan kenaikan harga barang-barang dipasaran dan/atau barang/jasa yang tidak dapat diperoleh dalam pada waktu yang dibutuhkan. Kondisi itulah yang dapat menyebabkan tertundanya pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berakibat pada penyerapan anggaran yang relatif rendah. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus benar-benar realistis dan anggaran yang telah disetujui dapat digunakan secara optimal.

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pedoman dalam pengadaan barang/jasa yaitu e-katalog. Dannis Wongso mengemukakan bahwa e-katalog adalah sebuah daftar yang dibuat secara elektronik yang dapat diakses secara online berbasis internet. Pemberlakuan e-katalog diorientasikan penyusunan anggaran yang riil sehingga dapat meningkatkan kinerja penyerapan anggaran. Rendahnya penyerapan anggaran, mencerminkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut tidak mampu menyusun anggaran secara akurat, bahkan terkesan tidak profesional. Oleh karena itu penting bagi setiap SKPD untuk menyusun anggaran yang sesuai dengan kebutuhan sehingga penyerapan anggaran dapat dioptimalkan.

Berdasarkan hasil observasi pada Pemerintah Kabupaten Magelang dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya penyerapan anggaran meliputi:

- 1) Terjadinya perbedaan harga barang/jasa, dimana harga barang/jasa yang tertuang dalam anggaran tidak mencukupi disebabkan adanya kenaikan harga barang/jasa di pasaran.
- 2) Tidak tersedia barang yang memenuhi standar kualitas sehingga dilakukan penundaan pengadaan barang/jasa atas program yang telah dituangkan dalam anggaran.
- 3) Akses pengadaan barang/jasa yang terbatas disebabkan keberadaan barang/jasa berada di luar jangkauan sehingga memerlukan waktu yang lama dalam pengadaannya, sementara barang/jasa dibutuhkan dalam kurun waktu yang relatif terbatas.



Beberapa kendala yang menjadi penyebab tidak terserapnya anggaran pengadaan barang/jasa menyebabkan adanya beberapa program kerja SKPD yang tidak terealisasi. Mengingat berbagai yang menjadi faktor penghambat dalam penyusunan anggaran yang mendekati realitas, maka setiap SKPD diwajibkan untuk menggunakan aplikasi e-katalog dalam pengajuan anggaran pengadaan barang/jasa melalui Instruksi Bupati Magelang.

Instruksi Bupati tentunya menjadi sebuah kewajiban bagi setiap SKPD dalam melaksanakan penyusunan anggaran berbasis e-katalog. Aplikasi e-katalog walaupun sudah berlangsung cukup lama, namun demikian dalam implementasinya tidak semudah yang diperkirakan. Pemilik toko online yang terdaftar dalam e-katalog tentunya sangat banyak dengan jenis barang/jasa yang sama dan dengan harga yang berbeda-beda. Dalam kondisi ini tentunya penyusun anggaran dihadapkan pada fenomena terhadap jenis dan harga barang/jasa yang ada di e-katalog. Penyusun anggaran juga dihadapkan pada pertimbangan biaya pengiriman barang dan tentunya akan mempengaruhi harga barang yang dibutuhkan. Dalam kondisi ini yang demikian, tentunya penggunaan e-katalog harus jeli terhadap pemilihan barang, harga barang dan ongkos kirim, secara akurat sehingga dapat meningkatkan kinerja penyerapan anggaran SKD di Pemerintah Kabupaten Magelang. Landasan teori, meliputi:

1) Penyerapan Anggaran

Menurut Halim penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran). Oleh karena yang diamati adalah entitas pemerintahan atau organisasi sektor publik, maka penyerapan anggaran dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertentu. Sedangkan Lubis mengemukakan bahwa penyerapan anggaran adalah salah satu dari beberapa tahapan dalam siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPRD), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.

Jumriani mengemukakan bahwa penyerapan anggaran adalah kemampuan Pemerintah Daerah mewujudkan program dan kegiatan dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) . Sedangkan Oktaliza et al (2020) menjelaskan bahwa faktor perencanaan anggaran memberikan pengaruh signifikan terhadap proses penyerapan anggaran.

Secara empiris kemampuan penyerapan dianggap baik dan berhasil apabila realisasi anggaran sesuai dengan kondisi riil atas pekerjaan yang dapat diselesaikan. Penyelesaian pekerjaan ini tentunya terkait langsung dengan target yang telah ditetapkan atau direncanakan sebelumnya, sehingga terdapat indikator yang pasti dalam mengukur perbandingan antara realita dengan target. Dalam hal ini tentunya penyerapan anggaran tidak dapat diukur dengan seberapa besar realisasi penggunaan anggaran karena besaran kecilnya penggunaan anggaran tidak dapat dijadikan ukuran dalam menilai efektifitas penyerapan anggaran.



Delia.et all, mengemukakan bahwa untuk memaksimalkan penyerapan anggaran dengan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan penerapan penganggaran berbasis kinerja. Bagi pengelola anggaran diharapkan dapat memberikan solusi dalam penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Safpremi dan Mustika Putri berpendapat faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran meliputi kualitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, dan pengadaan barang/jasa. Kondisi ini mempunyai implikasi bahwa perencanaan anggaran yang baik, tentunya akan dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran. Perencanaan anggaran yang hanya sekedar memenuhi regulasi dengan menggunakan asumsi-asumsi yang tidak realitis tentunya akan menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran. Perencanaan anggaran yang optimal secara eksplisit tidak terlepas kaitanya dengan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dalam perencanaan anggaran.

Perencanaan merupakan unsur penting di dalam organisasi. Perencanaan menentukan semua aktivitas yang diperlukan dan akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk merealisasikan perencanaan dibutuhkan anggaran. Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan alat politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. (Ramadhani & Setiawan, 2019). Apabila pelaksanaan anggaran tidak sejalan dengan kepentingan politik atau usulan pelaksanaan tidak sesuai dengan prioritas yang telah disepakati bersama, maka secara tidak langsung dapat menyebabkan tertundanya pelaksanaan kegiatan/program kerja.

2) E-Katalog

Dama mengemukakan bahwa katalog elektronik adalah suatu sistem berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, harga barang, yang dituangkan dalam suatu daftar dan mudah diakses secara digital. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) adalah lembaga yang mengelola dan mengembangkan e-katalog secara elektronik guna memenuhi kebutuhan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan beberapa definisi katalog elektronik di atas, dapat dikatakan bahwa e-katalog adalah alat yang memuat berbagai informasi tentang produk dan/atau jasa yang ditampilkan secara online. Informasi mengenai barang/jasa disediakan oleh penyedia barang/jasa, dan pihak manapun dapat melihat atau menggunakan barang/jasa dalam katalog online. Dalam hal ini setiap pemasok barang/jasa juga menunjukkan harga dari setiap produknya, dan setiap pemasok barang/jasa mempunyai pranala tersendiri agar pengguna web tidak bingung mencari barang/jasa yang sama, maka tidak terjadi kerancuan bagi pihak yang mengakses e-katalog.

Pengadaan barang/jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik dengan menggunakan sistem yang terdiri dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Pengadaan barang/jasa menggunakan pasar elektronik (e-marketplace), yang meliputi katalog elektronik (e-catalogue), toko online, dan pemilihan pemasok. SPSE merupakan aplikasi pengadaan yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) dan



diimplementasikan di K/L/P/D. Ruang lingkup SPSE terdiri dari perencanaan, persiapan, pemilihan pemasok, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan penyedia jasa dan katalog elektronik.

Pengadaan e-procurement merupakan suatu proses dalam melakukan pengadaan dengan menggunakan internet sebagai sarana informasi dan komunikasi. Menurut Sutedi e-procurement merupakan sistem lelang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi melalui internet, agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel. E-procurement merupakan sebuah sistem aplikasi yang mengelola data pengadaan yang di dalamnya meliputi data dengan basis internet yang didesain untuk menciptakan pengadaan yang efisien, efektif, dan terintegrasi.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa e-procurement adalah suatu proses/mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan peralatan teknis online, termasuk diantaranya lelang elektronik.

Kemunculan belanja elektronik dilatarbelakangi oleh tingginya tuntutan masyarakat terhadap informasi menyeluruh mengenai perolehan barang/jasa serta terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan e-procurement, hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dapat menjadi lebih cepat dan transparan, serta penipuan dapat dikurangi. Selain itu, tujuan pengadaan elektronik adalah untuk menciptakan lingkungan pengadaan yang transparan, efisien, efektif dan akuntabel untuk pengadaan melalui sarana elektronik antara Pelaku Pengadaan dan penyedia layanan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena membantu untuk menemukan definisi yang lebih baik tentang gejala situasional dan sosial dari perilaku yang diuji dan motif subjek yang diteliti. Selain itu, metode ini dapat meningkatkan pemahaman peneliti tentang bagaimana subjek mempersepsi dan menafsirkan peran e-katalog dalam penyerapan anggaran SKPD di Pemerintahan Kabupaten Magelang. Dalam menentukan informan, penelitian menggunakan metode purposive sampling dengan informan dari pengguna anggaran, pejabat barang dan jasa publik, dan kelompok kerja. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

DISKUSI

Menurut Pasal 17 UU Keuangan Negara Tahun 2003, anggaran adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara/daerah (pemerintah pusat/daerah) yang disetujui oleh DPR/DPRD. Anggaran memegang peranan penting dalam perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan kegiatan. Anggaran yang disusun dengan baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama periode waktu tertentu. Penganggaran adalah pencapaian suatu perkiraan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, yang ditinjau dalam jangka waktu tertentu (realisasi anggaran). Karena dianggap sebagai unit pemerintah atau organisasi sektor publik, penyerapan anggaran dalam LRA dapat diartikan sebagai pembayaran atau realisasi anggaran pada suatu waktu tertentu. Pelaksanaan pemanfaatan



anggaran sesuai perencanaan dapat dipengaruhi oleh faktor seperti sumber daya manusia pengendali anggaran, komitmen terhadap penyelenggaraan dan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa e-katalog secara empiris dapat meningkatkan pemanfaatan anggaran di SKPD Pemerintah Kabupaten Magelang. Pemanfaatan anggaran sebelum adanya e-katalog hanya sebesar 84,13%, namun kini sudah mencapai lebih dari 90%. Tingkat pemanfaatan anggaran SKPD pada Pemerintah Kabupaten Magelang adalah:

No	Name of Regional Government Work Unit	Years		
		2021	2022	2023
1	Sekretariat Daerah	93.52%	94.57%	94.25%
2	Sekretariat DPRD	94.37%	93.61%	94.95%
3	Inspektorat	93.91%	93.39%	95.35%
4	Dinas Kesehatan	87.34%	87.78%	89.14%
5	Dinas Komunikasi dan Informasi	92.53%	94.55%	95.29%
6	Dinas Perhubungan	93.71%	93.59%	93.62%
7	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Kebudayaan	92.63%	94.73%	94.88%
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	92.61%	93.61%	94.71%
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	92.77%	92.98%	93.67%
10	Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	93.61%	93.35%	93.81%
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	92.69%	94.45%	95.63%
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	93.00%	93.00%	94.00%
13	Dinas Peternakan dan Perikanan	92.65%	94.29%	93.62%
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	93.54%	95.38%	96.87%
15	Dinas Pertanian dan Pangan	92.45%	92.57%	95.36%
16	Dinas Lingkungan Hidup	93.35%	92.62%	97.51%
17	Dinas Penanaman Modal Rakyat & Kawasan Terpadu Satu Pintu	92.65%	93.63%	96.59%
18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	93.75%	92.59%	93.49%
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	93.53%	93.55%	94.44%
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	92.57%	93.51%	95.49%
21	BAPPEDA	93.56%	93.71%	93.64%
22	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	94.45%	93.89%	93.81%
23	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	95.65%	97.53%	97.88%
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	82.49%	84.51%	86.13%
25	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)	92.05%	93.73%	96.19%
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	93.55%	92.09%	93.89%



No	Name of Regional Government Work Unit	Years		
		2021	2022	2023
Average per year		92.65%	93.20%	94.39%
Average over 3 years		93.41%		

Sumber: Data Sekunder (diolah oleh peneliti, 2024)

Rata-rata penyerapan anggaran selama 3 tahun terakhir sebesar 93,41% yang berarti terdapat peningkatan kinerja dalam bidang penyerapan anggaran sebesar 9,28%. Hasil ini memberikan makna bahwa aplikasi e-katalog mampu meningkatkan kinerja penyerapan anggaran bagi SKPD di Pemerintah Kabupaten Magelang. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum diberlakukannya e-katalog, setiap penyusun anggaran harus mencari referensi barang/jasa yang dibutuhkan oleh setiap unit kerja.

Berbagai alasan yang diajukan masing-masing penyusun anggaran, memang realistis namun demikian setelah anggaran disetujui, ternyata tingkat penyerapan anggaran relatif rendah. Oleh karena itu dengan penerapan aplikasi e-katalog, SKPD tidak lagi menemui perbedaan harga barang/jasa secara signifikan. Secara empiris, SKPD di Pemerintah Kabupaten Magelang mampu meningkatkan kinerja penyerapan anggaran yang cukup tinggi dan kondisi ini memberikan makna bahwa dengan e-katalog, mampu memberikan efek positif dalam penggunaan keuangan negara. Namun demikian terdapat dua SKPD yang penyerapan anggaran masih dibawah 90% yaitu Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana. Penyerapan anggaran yang tetap berada pada kisaran 80% disebabkan kondisi empiris yang dialami oleh Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana.

Dinas Kesehatan membawahi 29 Puskemas yang melayani kesehatan masyarakat, penyerapan anggaran yang relatif rendah merupakan keadaan yang wajar. Kondisi ini disebabkan kebutuhan barang berupa obat-obatan tergantung pada jumlah masyarakat yang berobat pada Puskemas. Dalam hal ini tentunya merupakan dilema dikarenakan ketika obat-obatan dianggarkan relatif rendah dan ternyata masyarakat yang berobat ke Puskemas relatif banyak, tentunya akan mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan Puskesmas. Sedangkan dengan anggaran obat-obatan yang cukup banyak, namun ternyata yang berobat ke Puskesmas berkurang, tentunya akan menyebabkan penyerapan anggaran yang lebih rendah. Oleh karena itu, tentunya Pemerintah Daerah tidak dapat menjadikan penyerapan anggaran sebagai barometer kinerja Dinas Kesehatan, demikian pula dengan Badan Penanggulangan Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana merupakan dinas dalam penyusunan anggaran diperuntukkan kegiatan ketika terjadi bencana. Penyerapan anggaran yang masih berada pada kisaran 80% tentunya menjadi hal yang wajar. Anggaran Badan Penanggulangan Bencana yang sebagian besar ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana, maka ketika di Kabupaten Magelang tidak terjadi bencana, maka anggaran untuk bantuan pada korban bencana menjadi nihil. Oleh karena itu, terhadap Badan Penanggulangan Bencana penyerapan anggaran tentunya tidak dijadikan sebagai indikator kinerja SKPD kecuali anggaran yang memang diperuntukkan pembangunan fisik maupun pelatihan dalam penanggulangan bencana.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa e-katalog secara empiris dapat meningkatkan kinerja penyerapan anggaran SKPD di Pemerintah Kabupaten Magelang. Penerapan e-katalog memberikan kemudahan bagi penyusun anggaran dalam mengajukan usulan dengan harga barang/jasa yang tertuang dalam e-katalog sehingga perencanaan anggaran lebih realistis sehingga tingkat penyerapan anggaran dapat mencapai rata-rata 93,41%. Penyerapan anggaran Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana yang masih di berada pada kisaran 80%, disebabkan oleh kondisi empiris berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat dan bantuan pada masyarakat yang terkena bencana.

REFERENSI

- Dama, Y., Rotinsulu, T. O., & Walewangko, E. N, 2020. Pengaruh Implementasi E-Purchasing, Akses Pasar, Dan Persaingan Bisnis Terhadap Prinsip Akuntabel Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Joournal Pembangunan ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20(04), 39–53
- Delia. Titin, Djaddang. Syahril, Suratno, Mulyadi. *JMV. Analisis Determinasi Penyerapan Anggaran Dengan Perencanaan Anggaran Dan Politik Anggaran Sebagai Pemoderasi*, *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* Vol. 4(1), 2021.
- Halim, Abdul. 2019. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta, Salemba Empat
- Iqbal.Muhammad, Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM, *Jurnal USM Law Review*, Vol 3 No 1 Tahun 2020
- Lubis, I. 2020. *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Mardiasmo. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Nordiwani, D., dan Hertianti, A. 2020. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta, Salemba Empat.
- Oktaliza, Y., Ahyaruddin, M., & Putri, A. M.. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* Vol 11, No 9, April 2020
- Sutedi, 2020. Adrian. *Good Corporate Governance*. Sinar Grafika. Jakarta
- Wongso. Dannis, *Perancangan dan Implementasi Catalog Online Berbasis Website di Cahaya Gold Batam*, 2020, *UIB Repository*©2020
- Yolla Safpremi dan Annie Mustika Putri, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pasaman, *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* Vol 7, No 2, November 2022.

